

# Studi Nilai Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Jawa Timur

H.M. Ismail

Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Abstract: This study aims to assess the suitability of the products of SNI in East Java; engage in activities that aim to assess the suitability of a product, process, management system, and/or competency standards or other provisions that have been assigned to the SNI products in East Java; harmony plans, processes, information, materials for making decisions, actions, results, analysis, and learning to support the main purpose of suitability assessment SNI products in East Java; know the obstacles and drivers of the suitability standard ISO products in East Java. This research approach is quantitative with survey method. Instruments used in the implementation of a questionnaire survey. The results of this study are as follows: (1) There are clear criteria in determining the SNI products, and information obtained by the parties concerned can be accessed easily, (2) In the third component of the survey, namely non-food products, food products, and public opinion, all states that stakeholders can participate in the development of SNI and open, (3) There is transparency in the development of SNI ranging from programming and formulation stage to the stage of establishment, (4) On average, respondents said that the stakeholders can manyalurkan interests and treated fair, (5) trading facility provided by the national government in order to standardize considered effective and relevant, (6) There is a connectedness in the development of national standardization. In the third component of the survey contained figure of 2.83 in non-food product components, 2,76 on the components of food products, and 2.89 on the components of public opinion; (7) national standardization program that also consider the public interest and also interest national was also considered by respondents to have dimensions of development; (8) An increasing Index Standard Suitability Test Items from the year 2008–2010, although the range in 2007–2008 has decreased; (9) Index Standard Product SuitabilityTest in East Java viewed from statistical data presented in general belong to the category of "good"; (10) for products already in the survey, referring to the results of statistical data, it deserves to get the label of SNI from stakeholders.*

**Keywords:** Indonesian National Standard (SNI), standardization, suitability

Sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Badan Standarisasi Nasional (BSN) mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi. Maka kemudian Badan Standarisasi Nasional (BSN) bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan produsen dalam memenuhi standar kualitas. Ini dilakukan untuk menjamin terciptanya proses perdagangan

yang adil serta menunjang pertumbuhan produk nasional dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan keunggulan produk yang kompetitif dalam kancah nasional.

Standarisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan standarisasi oleh industri menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan strategis, yang mana di antaranya adalah peningkatan daya saing ekspor produk Indonesia, peningkatan daya saing

---

## Alamat Korespondensi:

H.M. Ismail, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

produk Indonesia terhadap produk impor, peningkatan efisiensi nasional, dan menunjang program keterikatan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya.

SNI memberi manfaat tidak hanya bagi konsumen atau masyarakat, melainkan bagi pengusaha produk sendiri. Dengan adanya standar nasional, pengusaha mendapat kepastian batas persyaratan yang harus dipenuhi. Kepastian tersebut secara ekonomis memberikan manfaat bagi pengusaha. Dengan adanya persyaratan SNI, maka perusahaan dapat mengkalkulasi secara lebih pasti biaya produksi untuk produksinya. Keuntungan SNI secara ekonomis juga dirasakan oleh negara. Nilai tambah industri atas penerapan SNI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp202,6 triliun atau sekitar 3,61% dari total PDB tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp5.613 triliun. Kepala Badan Standardisasi Nasional Indonesia, Bambang Setiadi, menyebutkan untuk industri air minum dalam kemasan, keuntungan yang diperoleh mencapai Rp3,4 triliun, minyak goreng mencapai Rp18,6 triliun, garam beryodium sebesar Rp547 miliar, dan komoditas pupuk sebesar Rp1,4 triliun. Itu hanya untuk 4 produk, belum dengan produk-produk lain.

Terkait dengan semakin pentingnya fungsi standarisasi nasional ini, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Bulan November sebagai bulan produktivitas dan mutu. Ini berawal dari Konvensi Nasional Standarisasi pada tanggal 5–7 November 1991 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Dewan Standarisasi Nasional (DSN). Maka seiring dengan berjalannya waktu, Bulan November kemudian diperingati sebagai bulan mutu nasional dan Hari Standar Dunia.

Kegiatan Bulan Mutu dan Hari Standar Dunia merupakan ajang tahunan yang bersifat nasional dengan berbagai kegiatan standarisasi bernuansa pembinaan, informasi, promosi dan ilmiah. Dari kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap "standard penilaian kesesuaian" yang berujung pada terciptanya masyarakat sadar mutu dan berbudaya standar. Standar Nasional Indonesia yang kemudian disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN.

Agar SNI memperoleh apresiasi dari *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO code of good practice*, yaitu:

- *Openness* (keterbukaan): terbuka bagi semua *stakeholder*; agar semua yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- *Transparency* (transparansi): transparan, agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Ini juga dimaksudkan agar para *stakeholder* dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- *Consensus and impartiality* (Konsensus dan tidak memihak): ini bertujuan agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- *Effectiveness and relevance* (efektifitas dan relevansi): ini dimaksudkan agar dapat memfasilitasi perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- *Cohherence* (koherensi): ini dimaksudkan agar koheren dengan pengembangan standar internasional supaya perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional, dan;
- *Development dimension* (berdimensi pembangunan): mempunyai dimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Badan Standarisasi Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Standarisasi Indonesia (MASTAN) wilayah Jawa Timur, Universitas Surabaya, PT. Semen Gresik, PT. Garuda Food dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan promosi SNI dalam rangka memperingati Bulan Mutu Nasional 2009. Namun produk yang diberi label SNI mempunyai kekurangan, yaitu pada tulisan SNI yang relatif kecil, sehingga konsumen mengalami kesulitan untuk membacanya.

Pelaku industri kerajinan tangan di Jawa Timur mendukung dengan baik rencana standarisasi produk tersebut, akan tetapi di samping itu pemerintah juga

diminta untuk memfasilitasi ketersediaan bahan baku lokal yang berkualitas dengan harga lebih murah. Abbas A.K, Manajer Jaringan Usaha Koperasi Jawa Timur, sebagai salah satu lembaga di bawah naungan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Jawa Timur, menilai rencana standarisasi kerajinan merupakan langkah positif guna meningkatkan daya saing di pasar, terutama sekali pasar internasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan barang yang beredar di pasaran dan juga sebagai salah satu bukti upaya pengamanan pasar dalam negeri. Tidak hanya mencegah kemungkinan masuknya barang yang substandard dari luar negeri, tetapi juga barang yang diproduksi di dalam negeri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang tertuang dalam ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen; Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional; Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/M-IDAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa.

Pada tahun 2009, di tengah maraknya produk-produk yang mengandung melamin dan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, maka pemerintah mengeluarkan Permendag No. 20/M-IDAG/PER/5/2009 yang mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Terbitnya peraturan perundangan ini berfungsi untuk menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.634/MPP/Kep/9/2002 yang menerangkan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar. Sedangkan pada tahun 2007 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.15/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia.

Bagi importir dan juga distributor yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi pembekuan terhadap izin impor dan SIUP. Selanjutnya untuk importir dan distributor tersebut diberikan waktu selama dua bulan sejak pemberian sanksi untuk menarik barangnya dari pasaran. Apabila ini tidak dilakukan, maka akan diproses lebih lanjut secara hukum dengan konsekuensi yang lebih berat sesuai dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dan akan ditindak tegas. Peraturan seperti ini dibuat yang mana salah satunya bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat di antara pelaku usaha.

Produk-produk yang mempunyai label SNI telah banyak beredar di Jawa Timur dan juga telah memenuhi standar mutu serta kualitas yang telah ditentukan oleh BSN. Produk-produk SNI ini dapat mengamanakan produk dalam negeri dari persaingan produk-produk luar negeri yang masuk ke Jawa Timur. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BSN mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi, sehingga secara otomatis BSN juga mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan produsen dalam memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Penilaian kesesuaian produk-produk SNI merupakan bagian dari upaya stimulasi peningkatan penerapan SNI untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Melalui penilaian tersebut diharapkan produsen dan konsumen semakin menghargai aspek mutu dan memahami perlunya berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan penggunaan SNI sebagai referensi penyediaan dan permintaan pasar. Penilaian SNI dapat menjadi acuan peningkatan kinerja organisasi, karena penilaian SNI melihat seluruh aspek yang dapat mendorong kemajuan organisasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik, yaitu kepemimpinan dan manajemen, fokus pada pelanggan, pengembangan sumberdaya, pengelolaan atau realisasi produk, dan hasil bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kesesuaian produk-produk SNI di Jawa Timur untuk meningkatkan penerapan SNI pada setiap produk yang telah beredar di masyarakat; melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi terhadap standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan terhadap produk-produk SNI di Jawa Timur; keharmonisan rencana, proses, informasi, bahan-bahan untuk pengambilan keputusan, tindakan, hasil, analisis, dan pembelajaran untuk mendukung tujuan utama penilaian kesesuaian produk-produk SNI di Jawa Timur; mengetahui kendala dan pendorong kesesuaian produk-produk berstandar SNI di Jawa Timur.

## METODE

Metodologi disusun untuk memudahkan peneliti dalam merinci pekerjaan dan menetapkan poin-poin penting, menyusunnya dalam skala prioritas dan menjadwalnya sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur, tepat sasaran, dan selesai tepat waktu sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survei. Jenis dan lingkup penelitian mencakup hal-hal yang akan diuraikan pada bagian statistik deskriptif yang meliputi: (a) Mencari nilai minimum dan maksimum dari jawaban responden pada tiap-tiap unsur pelayanan; (b) Menghitung nilai *mean* (rata-rata) dari jawaban responden pada tiap-tiap unsur pelayanan; (c) Menghitung nilai deviasi standar (standar simpangan baku) dari jawaban responden pada tiap-tiap unsur pelayanan; (d) Menghitung nilai persentase masing-masing jawaban responden pada tiap-tiap unsur pelayanan.

Instrumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan survei berupa kuesioner. Kuesioner terlebih dahulu diuji keandalan atau reliabilitas (*reliability*) pengukurannya. Dalam hal ini digunakan uji reliabilitas dengan teknik *Cronbach Alpha*. Begitu pula dengan data primer (jawaban responden) yang dikumpulkan

melalui instrumen kuesioner, juga harus diuji kevaliditasannya. Dalam pengujian validitas data digunakan teknik korelasi *bivariate R pearson*.

## Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana nilai kesesuaian produk-produk SNI di Jawa Timur, yang meliputi: kesesuaian suatu produk, proses, sistem manajemen, dan atau kompetensi terhadap standar atau ketentuan lain yang telah ditetapkan terhadap produk-produk SNI di Jawa Timur; Bagaimana keterharmonisan rencana, proses, informasi, bahan-bahan untuk pengambilan keputusan, tindakan, hasil, analisis, dan pembelajaran untuk mendukung tujuan utama penilaian kesesuaian produk-produk SNI di Jawa Timur; Apa saja kendala dan pendorong kesesuaian produk-produk berstandar SNI di Jawa Timur.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Survei dimulai dengan melakukan observasi langsung ke 10 lokasi industri yang memiliki standarisasi SNI dan memberikan kuesioner kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan di unit-unit pelayanan tersebut. Responden diambil dari daerah Malang, Gresik,

Tabel 1. Jumlah dan Karakteristik Responden

Identitas Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	850	62,9
Perempuan	500	37,1
Usia:		
< 21 tahun	45	3,3
21 – 30 tahun	223	16,6
31 – 40 tahun	725	53,7
41 – 50 tahun	265	19,6
> 50 tahun	92	6,8
Pendidikan:		
SD	213	15,8
SLTP	472	35,0
SLTA	562	41,7
Diploma	58	4,2
Sarjana	45	3,3
Status Marital:		
Menikah	994	73,6
Belum Menikah	321	23,8
Duda	25	1,9
Janda	10	0,7

Pasuruan, Blitar, Tulungagung. Pengambilan sampel (responden) pada survei pada 1 (satu) produk minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Di samping dilakukan survei juga dilakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan produk industri yang telah mempunyai SNI. Secara detail, berikut adalah tabel jumlah serta karakteristik responden.

Produk-produk yang disurvei adalah produk non-makanan dan produk makanan. Produk non-makanan meliputi: Pupuk kalium klorida SNI 02-2805-2005, Ban mobil penumpang SNI 06-0098-2002, Semen Portland campur SNI 15-3500-1994, Pupuk mono ammonium fosfat (MAP) SNI 02-2810-1992, Karet konvensional SNI 06-0001-1987. Produk makanan meliputi: Air minum dalam kemasan SNI 01-3553-1996; Tepung terigu sebagai bahan makanan SNI 01-3751-2000, Mi instan SNI 01-3551-2000, Garam konsumsi beryodium SNI 3556:2010, Gula Kristal putih (*plantation white sugar*) SNI 3140.3:2010.

Komponen-komponen yang disurvei meliputi: Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan; Kejelasan dan kepastian; Kedisiplinan; Tanggung jawab; Keterbukaan (*openness*); Transparansi (*transparency*); Konsensus dan tidak memihak (*consensus and impartiality*); Efektifitas dan relevansi (*effectiveness and relevance*); Koherensi (*coherence*); Berdimensi pembangunan (*development dimension*).

Instrumen survei berupa kuesioner disebarluaskan ke seluruh unit yang telah ditetapkan di atas, yang terdiri dari 5 produk non-makanan, 4 produk makanan, dan 5 daerah yang menjadi pelaksanaan survei opini publik di Jawa Timur. Kuesioner dibacakan oleh

Tabel 2. Descriptive Statistics Produk Non-Makanan

Unsur Pelayanan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	1	4	2.84	0.408
Kejelasan dan kepastian	450	1	4	2.77	0.476
Kedisiplinan	450	1	4	2.83	0.481
Tanggung jawab	450	1	4	2.85	0.466
Keterbukaan	450	1	4	2.82	0.467
Transparansi	450	1	4	2.79	0.481
Konsensus dan tidak memihak	450	1	4	2.82	0.475
Efektifitas dan relevansi	450	1	4	2.76	0.477
Koherensi	450	1	4	2.83	0.476
Berdimensi pembangunan	450	1	4	2.83	0.472
Valid N (listwise)	450				

petugas survei dan direspon secara langsung oleh para responden. Petugas survei tidak mengijinkan para responden untuk mendekati proses survei. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas jawaban dari responden. Selama pelaksanaan survei ini, tidak ditemukan adanya kendala yang berarti dari responden.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan *scoring* dan *entry* data. *Scoring* yang dilakukan adalah dengan memberi kode berupa angka (skor) pada jawaban yang telah diisi oleh responden dengan kategori:

Jawaban "a" diberi skor "1"

Jawaban "b" diberi skor "2"

Jawaban "c" diberi skor "3"

Jawaban "d" diberi skor "4"

Sedangkan *entry* data yang dilakukan adalah dengan cara memasukkan data hasil *scoring* tersebut ke dalam tabulasi pada masing-masing unsur produk.

## Analisis Data

Analisis data mencakup: (1) Refleksi indeks kesesuaian pada produk SNI; (2) Penjelasan dan interpretasi kualitatif dari hasil *Analisis Statistic Descriptive*, hasil pengujian kualitas data dan instrumen, dan refleksi indeks kesesuaian pada produk SNI.

## HASIL

### Statistik Deskriptif Produk Non-Makanan

Sebagai gambaran umum data yang diperoleh secara statistik, berikut ini disajikan hasil analisis statistik pada masing-masing produk non-makanan.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Standarisasi

No.	Rentang Skala	Kriteria Penilaian Standarisasi
1	1.00 – 1.74	Tidak sesuai/Tidak jelas/Tidak disiplin/Tidak bertanggungjawab/Tidak terbuka/Tidak transparan/Tidak adil/ Tidak efektif dan relevan/Tidak Koheren/Tidak berdimensi pembangunan Kurang sesuai/Kurang jelas/Kurang disiplin/Kurang bertanggungjawab/Kurang terbuka/Kurang transparan/Kurang adil/Kurang efektif dan relevan/Kurang Koheren/Kurang berdimensi pembangunan
2	1.75 – 2.49	Sesuai/Jelas/Disiplin/Bertanggungjawab/Terbuka/Transparan/ Adil/Efektif dan relevan/Koheren/Berdimensi pembangunan
3	2.50 – 3.24	Sangat sesuai/Sangat jelas/Sangat disiplin/Sangat bertanggungjawab/Sangat terbuka/Sangat transparan/Sangat adil/Sangat efektif dan relevan/Sangat Koheren/sangat berdimensi pembangunan
4	3.25 – 4.00	

Berdasarkan deskripsi statistik, diketahui skor minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 4 pada semua unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap alternatif jawaban yang disediakan mendapat penilaian dari 450 responden, yaitu dari jawaban sangat negatif (skor 1) hingga yang sangat positif (skor 4).

Secara rinci, penjelasan dari data statistik pada Tabel 2.

#### Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan

Nilai *statistic mean* dari unsur kesesuaian persyaratan dengan pelayanan adalah 2,84. Artinya rata-rata responden menyatakan antara standar yang ditetapkan dengan kualitas produk yang memiliki SNI sudah sesuai.

#### Kejelasan dan Kepastian

Nilai *statistic mean* dari unsur kejelasan dan kepastian petugas adalah 2,77. Artinya rata-rata responden menyatakan adanya standar yang jelas dan pasti dalam penetapan produk SNI.

#### Kedisiplinan

Nilai *statistic mean* dari unsur kedisiplinan sebesar 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen memiliki sikap disiplin dalam mengontrol kualitas produksi.

#### Tanggung Jawab

Nilai *statistic mean* dari unsur tanggung jawab petugas sebesar 2,85. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang telah dikeluarkannya.

#### Keterbukaan

Nilai *statistic mean* dari unsur keterbukaan adalah 2,82. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa semua *stakeholder* dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI dan dalam prosesnya berjalan terbuka.

#### Transparansi

Nilai *statistic mean* dari unsur transparansi 2,79. Ini menandakan rata-rata responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dengan nilai 2,79 tersebut juga menandakan bahwa *stakeholder* dapat dengan mudah memperoleh informasi yang berkaitan dengan SNI dan dapat memperoleh transparansi.

#### Konsensus dan tidak memihak

Nilai *statistic mean* dari unsur konsensus dan tidak memihak sebesar 2,82. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

### Efektifitas dan relevansi

Nilai *statistic mean* dari unsur efektifitas dan relevansi sebesar 2,76. Ini menandakan rata-rata responden menyatakan bahwa terdapat fasilitas untuk melakukan perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya fasilitas yang sudah ada efektif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

### Koherensi

Nilai *statistic mean* dari unsur koherensi sebesar 2,83. Ini menandakan rata-rata responden menyatakan kesepakatannya dengan penerapan standarisasi produk. Ini dimaksudkan supaya perkembangan pasar negara Indonesia tidak terisolasi dengan perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional. Dengan nilai angka di atas, maka penerapan standarisasi dinilai responden sudah koheren.

### Berdimensi pembangunan

Nilai *statistic mean* dari unsur berdimensi pembangunan sebesar 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa penerapan standarisasi berdimensi pembangunan agar mementingkan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

### Statistik Deskriptif Produk Makanan

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif sebagai gambaran umum data pada masing-masing produk makanan.

Berdasarkan deskripsi statistik, diketahui skor minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 4 pada unsur pelayanan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pada alternatif jawaban yang disediakan ternyata mendapat penilaian dari 450 responden, dari jawaban sangat negatif (skor 1) hingga yang sangat positif (skor 4).

Beberapa hasil yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

### Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan

Nilai *statistic mean* dari unsur kesesuaian persyaratan dengan pelayanan adalah 2,84. Artinya rata-rata responden menyatakan antara standar yang ditetapkan dengan kualitas produk makanan yang memiliki SNI sudah sesuai.

### Kejelasan dan Kepastian

Nilai *statistic mean* dari unsur kejelasan dan kepastian petugas adalah 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan adanya standar yang jelas dan pasti dalam penetapan produk makanan yang mempunyai label SNI.

Tabel 4. Descriptive Statistics Produk Makanan

Unsur Pelayanan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	1	3	2,84	0,368
Kejelasan dan kepastian	450	1	4	2,83	0,397
Kedisiplinan	450	1	3	2,83	0,374
Tanggung jawab	450	2	3	2,84	0,368
Keterbukaan	450	1	3	2,81	0,371
Transparansi	450	1	4	2,64	0,365
Konsensus dan tidak memihak	450	1	4	2,75	0,367
Efektifitas dan relevansi	450	1	3	2,69	0,372
Koherensi	450	1	4	2,76	0,373
Berdimensi pembangunan	450	1	4	2,81	0,380
Valid N (listwise)	450				

### Kedisiplinan

Nilai *statistic mean* dari unsur kedisiplinan adalah 2,83. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen memiliki sikap disiplin dalam mengontrol kualitas produksi.

### Tanggung Jawab

Nilai *statistic mean* dari unsur tanggungjawab petugas adalah 2,84. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang telah dikeluarkannya.

### Keterbukaan

Nilai *statistic mean* dari unsur keterbukaan sebesar 2,81. Artinya yang berkepentingan dalam pengembangan SNI dinilai responden terbuka.

### Transparansi

Nilai *statistic mean* dari unsur transparansi sebesar 2,64. Artinya semua *stakeholder* yang mengikuti pengembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya dinilai transparan. Adanya transparansi ini juga dimaksudkan agar para *stakeholder* dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

### Konsensus dan tidak memihak

Nilai *statistic mean* dari unsur konsensus dan tidak memihak sebesar 2,75. Artinya responden

menyatakan ada rasa adil ketika *stakeholder* melakukan kepentingannya.

### Efektifitas dan relevansi

Nilai *statistic mean* dari unsur efektifitas dan relevansi sebesar 2,69. Artinya pemberian fasilitas perdagangan dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai efektif dan relevan.

### Koherensi

Nilai *statistic mean* dari unsur koherensi sebesar 2,76. Artinya pengembangan standarisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pasar negara Indonesia dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional dinilai oleh responden koheren.

### Berdimensi pembangunan

Nilai *statistic mean* dari unsur berdimensi pembangunan sebesar 2,81. Artinya penerapan standarisasi nasional yang terkait dengan aspek kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dinilai oleh responden memiliki dimensi pembangunan.

### Statistik Deskriptif Opini Publik terhadap Produk SNI

Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif (*descriptive statistics*) sebagai gambaran umum

**Tabel 5. Descriptive Statistics Opini Publik terhadap SNI**

Unsur Pelayanan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	2	3	2.98	0,140
Kejelasan dan kepastian	450	2	3	2.96	0,197
Kedisiplinan	450	2	3	2.95	0,212
Tanggung jawab	450	2	3	2.95	0,225
Keterbukaan	450	2	3	2.92	0,143
Transparansi	450	2	3	2.94	0,181
Konsensus dan tidak memihak	450	2	3	2.87	0,201
Efektifitas dan relevansi	450	2	3	2.93	0,196
Koherensi	450	2	3	2.89	0,197
Berdimensi pembangunan	450	2	3	2.95	0,156
Valid N (listwise)	450				

data tentang opini publik terkait dengan produk yang memiliki label SNI di Jawa Timur.

Berdasarkan deskripsi statistik, diketahui skor minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 4 pada kepuasan publik terhadap produk SNI. Hal ini menunjukkan bahwa pada alternatif jawaban yang disediakan ternyata mendapat penilaian dari 450 responden, dari jawaban sangat negatif (skor 1) hingga yang sangat positif (skor 4).

Beberapa hasil yang dapat dimunculkan adalah sebagai berikut:

### Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan

Nilai *statistic mean* dari unsur kesesuaian persyaratan dengan pelayanan adalah 2,98. Artinya rata-rata responden menyatakan antara standar yang ditetapkan dengan kualitas produk makanan yang memiliki SNI sudah sesuai.

### Kejelasan dan Kepastian

Nilai *statistic mean* dari unsur kejelasan dan kepastian petugas adalah 2,96. Artinya rata-rata responden menyatakan adanya standar yang jelas dan pasti dalam penetapan produk makanan yang mempunyai label SNI.

### Kedisiplinan

Nilai *statistic mean* dari unsur kedisiplinan adalah 2,95. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen memiliki sikap disiplin dalam mengontrol kualitas produksi.

### Tanggung Jawab

Nilai *statistic mean* dari unsur tanggungjawab petugas adalah 2,95. Artinya rata-rata responden menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab atas produk yang telah dikeluarkannya.

### Keterbukaan

Nilai *statistic mean* dari unsur keterbukaan sebesar 2,92. Artinya ada keterbukaan ketika *stakeholder* berpartisipasi dalam pengembangan SNI.

### Transparansi

Nilai *statistic mean* dari unsur transparansi sebesar 2,94. Ini artinya *stakeholder* yang berkepentingan mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman, perumusan bahkan sampai penetapannya dinilai oleh responden dengan nilai transparan.

### Konsensus dan tidak memihak

Nilai *statistic mean* dari unsur konsensus dan tidak memihak sebesar 2,87. Artinya *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

### Efektifitas dan relevansi

Nilai *statistic mean* dari unsur efektifitas dan relevansi sebesar 2,93. Artinya responden menilai fasilitas perdagangan yang disediakan dalam rangka standarisasi dengan nilai efektif dan relevan.

### Koherensi

Nilai *statistic mean* dari unsur koherensi sebesar 2,89. Ini artinya terdapat nilai yang koheren dalam pengembangan standarisasi, supaya perkembangan pasar dalam negeri tidak kalah bersaing dengan pasar global. Ini juga berfungsi untuk memperlancar arus perdagangan internasional.

### Berdimensi pembangunan

Nilai *statistic mean* dari unsur yang berdimensi pembangunan sebesar 2,95. Ini artinya pembangunan dalam aspek kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian mempunyai dimensi pembangunan.

## PEMBAHASAN

### Pengujian Kualitas Instrumen dan Data

Dari hasil uji reliabilitas diketahui variabel kesesuaian produk SNI di produk non-makanan memiliki *Cronbach Alpha* sebesar  $0.835 > 0.60$ , di produk makanan memiliki *Cronbach Alpha* sebesar  $0.863 > 0.60$ , dan di opini publik memiliki *Cronbach Alpha* sebesar  $0.802 > 0.60$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen (kuesioner) yang dipergunakan

Tabel 6. Reliabilitas Instrumen Survei

VARIABEL	UNSUR	CRONBACH ALPHA	KESIMPULAN
KESESUAIAN PRODUK SNI	PRODUK MAKANAN	NON-	0,835
	PRODUK MAKANAN		0,863
	OPINI PUBLIK		0,802

Tabel 7. Validitas Data Pada Unit Produk Non-Makanan

Unsur	N	Koefisien R Pearson	Sig.	Kesimpulan
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	0,544**	0,000	Valid
Kejelasan dan kepastian	450	0,567**	0,000	Valid
Kedisiplinan	450	0,616**	0,000	Valid
Tanggung jawab	450	0,656**	0,000	Valid
Keterbukaan	450	0,561**	0,000	Valid
Transparansi	450	0,563**	0,000	Valid
Konsensus dan tidak memihak	450	0,631**	0,000	Valid
Efektifitas dan relevansi	450	0,591**	0,000	Valid
KoherenSI	450	0,621**	0,000	Valid
Berdimensi pembangunan	450	0,653**	0,000	Valid

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabel 8. Validitas Data Pada Produk Makanan

Unsur Pelayanan	N	Koefisien R Pearson	Sig.	Kesimpulan
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	0,644**	0,000	Valid
Kejelasan dan kepastian	450	0,568**	0,000	Valid
Kedisiplinan	450	0,725**	0,000	Valid
Tanggung jawab	450	0,697**	0,000	Valid
Keterbukaan	450	0,721**	0,000	Valid
Transparansi	450	0,671**	0,000	Valid
Konsensus dan tidak memihak	450	0,835**	0,000	Valid
Efektifitas dan relevansi	450	0,782**	0,000	Valid
KoherenSI	450	0,832**	0,000	Valid
Berdimensi pembangunan	450	0,759**	0,000	Valid

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

dalam survei ini dapat diandalkan (reliabel) untuk mengukur kesesuaian produk SNI di Jawa Timur.

Dari hasil uji validitas di atas, diketahui semua unsur pelayanan (empat unsur) memiliki taraf signifikansi di bawah 1% (ditandai dengan \*\*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data jawaban responden pada masing-masing unsur dinilai

valid karena mencerminkan kesesuaian atas kualitas produk yang mempunyai SNI di Jawa Timur.

Dari hasil uji validitas di atas, diketahui memiliki signifikansi di bawah 1% (ditandai dengan \*\*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data jawaban responden pada masing-masing unsur dinilai valid karena mencerminkan kesesuaian atas kualitas produk yang mempunyai SNI di Jawa Timur.

Tabel 9. Validitas Data Pada Opini Publik

Unsur Pelayanan	N	Koefisien R Pearson	Sig.	Kesimpulan
Kesesuaian persyaratan dengan pelayanan	450	0.543**	0.000	Valid
Kejelasan dan kepastian	450	0.445**	0.000	Valid
Kedisiplinan	450	0.475**	0.000	Valid
Tanggung jawab	450	0.488**	0.000	Valid
Keterbukaan	450	0.678**	0.000	Valid
Transparansi	450	0.671**	0.000	Valid
Konsensus dan tidak memihak	450	0.575**	0.000	Valid
Efektivitas dan relevansi	450	0.611**	0.000	Valid
Koh erensi	450	0.531**	0.000	Valid
Berdimensi pembangunan	450	0.579**	0.000	Valid

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabel 10. Refleksi Kesesuaian SNI di Jawa Timur 2007–2010

No.	Unsur	Nilai Kesesuaian SNI			
		Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009	Th. 2010
1.	Pupuk Kalium Klorida	74.96 (B)	64.18 (B)	66.56 (B)	67.57 (B)
2.	Ban Mobil Penumpang	74.88 (B)	61.35 (C)	62.58 (B)	70.11 (B)
3.	Semen Portland Campur	74.92 (B)	64.53 (B)	64.01 (B)	65.00 (B)
4.	Pupuk Mono Ammonium Fosfat	74.47 (B)	59.94 (C)	64.87 (B)	64.61 (B)
5.	Karet Konvensional	75.64 (B)	65.25 (B)	65.29 (B)	73.91 (B)
6.	Air Minum Dalam Kemasan	75.28 (B)	64.81 (B)	67.70 (B)	67.79 (B)
7.	Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan	75.45 (B)	63.36 (B)	63.31 (B)	64.27 (B)
8.	Mi Instan	73.02 (B)	66.50 (B)	66.50 (B)	72.74 (B)
9.	Garam Konsumsi Beryodium	75.62 (B)	65.62 (B)	65.60 (B)	61.76 (C)
10.	Gula Kristal Putih	75.12 (B)	60.35 (C)	68.68 (B)	64.66 (B)
11.	Malang	72.86 (B)	62.38 (C)	59.58 (C)	72.88 (B)
12.	Blitar	74.01 (B)	57.09 (C)	57.13 (C)	70.41 (B)
13.	Gresik	75.64 (B)	64.34 (B)	59.87 (C)	70.41 (B)
14.	Pasuruan	74.62 (B)	62.09 (C)	59.19 (C)	68.29 (B)
15.	Tulungagung	73.62 (B)	64.34 (B)	59.58 (C)	64.66 (B)
<b>Rata-rata</b>		<b>74.67</b>	<b>63.07</b>	<b>63.36</b>	<b>67.93</b>

Dari hasil uji validitas opini publik diketahui bahwa semua unsur pelayanan (empat unsur) memiliki signifikansi di bawah 1% (ditandai dengan \*\*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh data jawaban responden pada masing-masing unsur pelayanan dinilai valid karena mencerminkan kesesuaian atas kualitas produk yang mempunyai SNI di Jawa Timur.

#### Nilai Kesesuaian SNI

Sebagai bahan perbandingan pelaksana survei melakukan analisa kesesuaian SNI yang dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2007–2010.

Selama tahun 2007–2010 diketahui nilai kesesuaian produk berstandar SNI di Jawa Timur

cenderung fluktuatif. Pada tahun 2006, Indeks Kesesuaian Produk Berstandar SNI pada tahun 2006 menunjukkan angka 74,67 dan ini masuk dalam kategori "baik". Kondisi dalam kategori "baik" ini tetap berlanjut sampai pada tahun 2010, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2008. Dari tahun 2007 ke 2008 turun 11,6, pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari 63,07 menjadi 63,36. Kondisi peningkatan ini juga terjadi di tahun 2010 dengan peningkatan sebesar 4,57.

Dari kondisi di atas, meskipun pada tahun 2008 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun-tahun setelah itu indeks kesesuaian mengalami peningkatan terus menerus. Ini menandakan bahwa produk yang memiliki label SNI terdapat peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Dari data di atas diketahui bahwa pada tahun 2010 nilai tertinggi adalah karet konvensional dengan angka 73,91, sedangkan yang terendah adalah garam konsumsi beryodium dengan angka 61,76. Secara umum indeks kesesuaian SNI pada tahun 2010 masih di bawah indeks kesesuaian SNI tahun 2007 dengan selisih angka 6,74 dari tahun 2007.

Secara umum nilai kesesuaian dari semua komponen yang seperti disebut di atas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, terkecuali pada tahun dari tahun 2007 ke 2008. Kondisi menurunnya rata-rata nilai kesesuaian ini mungkin saja di sebabkan karena adanya krisis global yang terjadi di tahun 2008. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan beberapa himbauan terkait dengan ini. Diantaranya adalah meningkatkan produksi dalam negeri, dan juga memanfaatkan peluang perdagangan nasional. Maka kemudian hasilnya dapat kita lihat satu tahun berikutnya dengan meningkatnya nilai kesesuaian produk SNI dari 63,07 naik menjadi 63,36.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat kriteria yang jelas dalam penentuan produk SNI, dan informasi yang didapatkan oleh pihak yang berkepentingan dapat diakses dengan mudah. Kemudahan akses informasi ini yang kemudian menyebabkan banyak produsen atau pihak yang berkepentingan mengurus standarisasi produk mereka;

Pada ketiga komponen yang disurvei, di antaranya adalah produk non-makanan, produk makanan, dan opini publik, semua menyatakan bahwa *stakeholder* dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI dan terbuka. Pada produk non-makanan didapat angka sebesar 2,82, sedangkan pada produk makanan 2,81, dan pada opini publik sebesar 2,92;

Terdapat transparansi dalam pengembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Manfaat dari transparansi ini bagi pihak yang berkepentingan adalah mudahnya mengakses semua informasi yang berkaitan dengan SNI. Pada produk non-makanan didapat angka sebesar 2,79, pada produk makanan didapat angka sebesar 2,64, dan pada opini publik 2,94;

Rata-rata responden menyatakan bahwa *stakeholder* dapat manyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil. Pada produk non-makanan didapat angka sebesar 2,82, pada produk makanan didapat angka sebesar 2,75 dan pada opini publik 2,87. Dari ketiga komponen tersebut yang sangat rendah nilainya adalah pada produk makanan. Ini menandakan bahwa produk makanan yang berlabel SNI belum begitu menjadi prioritas pilihan masyarakat ketika berbelanja;

Fasilitas perdagangan yang disediakan pemerintah dalam rangka standarisasi nasional dinilai efektif dan relevan. Pada ketiga komponen didapat nilai 2,76 pada produk non-makanan, 2,69 pada produk makanan, dan 2,93 pada opini publik. Dari ketiga angka tersebut nilai terendah didapat dari produk makanan, ini berarti fasilitas yang disediakan pemerintah pada produk makanan masih rendah dibandingkan dengan yang lain;

Terdapat keterhubungan dalam pengembangan standarisasi nasional. Ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri. Pada ketiga komponen yang dilakukan survei terdapat angka sebesar 2,83 pada komponen produk non-makanan, 2,76 pada komponen produk makanan, dan 2,89 pada komponen opini publik. Dari ketiga komponen tersebut nilai terendah ada pada komponen produk makanan, yaitu sebesar 2,76;

Program standarisasi nasional yang juga memperhatikan kepentingan publik dan juga kepentingan nasional juga dinilai oleh responden memiliki dimensi pembangunan. Pada ketiga komponen nilai pada

produk non-makanan terdapat angka 2,83, pada produk non-makanan terdapat angka 2,81, dan pada opini publik sebesar 2,95. Dari ketiga komponen tersebut yang terendah angkanya terletak pada produk makanan, yaitu 2,81;

Terjadi peningkatan Indeks Kesesuaian Produk Berstandar SNI dari tahun 2008-2010, meskipun pada rentang tahun 2007-2008 mengalami penurunan;

Indeks Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Jawa Timur dilihat dari data statistik yang tersaji secara umum tergolong dalam kategori "baik". Artinya produk-produk tersebut memiliki kesesuaian antara persyaratan untuk mendapatkan label SNI dengan kondisi produk di lapangan;

Produk-produk yang telah di survei, merujuk pada hasil data statistik, memang pantas untuk mendapatkan label SNI dari pihak terkait.

### Saran

Berdasarkan data survei, maka peneliti menyeleksi beberapa hal sebagai berikut:

Nilai kesesuaian pada produk non-makanan yang terendah ada pada aspek kejelasan dan kepastian. Pada produk makanan ada pada aspek kesesuaian. Artinya pada produk makanan kesesuaian antara persyaratan SNI dengan kualitas produk belum cukup tinggi. Hal ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah dengan cara memperketat lagi pemberian SNI bagi para produsen yang bergerak dalam bidang makanan. Sedangkan pada aspek opini publik semuanya tergolong dalam kategori "baik". Artinya masyarakat melihat bahwa ada kesesuaian produk SNI yang beredar di masyarakat;

Peningkatan angka indeks kesesuaian SNI dari tahun ke tahun haruslah terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan produk-produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri;

Perlu adanya kemudahan bagi produsen dalam negeri untuk memperoleh standarisasi produk SNI, sehingga timbul dampak menguatnya usaha-usaha dalam negeri;

Produk makanan mendapatkan angka yang rendah hampir di semua unsur, meskipun masih sama kategorinya dengan kedua komponen yang lain. Melihat kondisi seperti ini, maka pemerintah perlu lebih menitikberatkan proses standarisasi nasional dalam

produk makanan tanpa mengurangi keseriusannya dalam menangani produk-produk yang lain;

Pemberian label SNI pada produk-produk dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri yang sekarang ini membanjiri Indonesia. Artinya setiap produk dalam negeri harus mempunyai standarisasi SNI. Apalagi kondisi ini ditambah lagi dengan pasar bebas yang telah mulai diterapkan kebijakannya di Indonesia;

Menyikapi perdagangan bebas yang telah diterapkan kebijakannya di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pembinaan terhadap produk-produk dalam negeri agar kualitasnya semakin bisa bersaing dengan produk luar negeri, sehingga perekonomian rakyat bisa semakin membaik dari hari ke hari.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdulwahab, S. 1999. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amstrong, M. 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Handoko, H. 1994. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Islamy, M.I. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan.
- Islamy, M.I. 1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musaneff. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, H.H. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Ratminto, & Atik, S.W. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S.P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sjamsuddin, S. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
- Stocker, G. 1966. *Kepemerintahan sebagai Teori: Lima proposisi*, Materi Kuliah PPSUB, Malang.
- Stoner, James, A.F., dan R. Edward, F. 1992. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.
- Terry, G.R. 1991. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

- Widodo, J. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.
- Kumpulan Tulisan Mahasiswa Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya. 2001. Tidak diterbitkan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 571/KEPI/BSN/161/2009 tentang Penetapan 3 (Tiga) Standar Nasional Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 03/KEP/BSN/1/2010 tentang Penetapan 2 (Dua) Amandemen Standar Nasional Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 04/KEP/BSN/1/2010 tentang Penetapan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia.
- Distribusi Jumlah Perusahaan Pengguna SNI Menurut Propinsi*. Badan Standarisasi Nasional Tahun 2008.
- Distribusi Perusahaan yang Tidak Menggunakan SNI dan SI*. Badan Standarisasi Nasional Tahun 2008.
- Hasil Survey Penilaian Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Jawa Timur 2007-2010*. Badan Standarisasi Nasional 2010.
- WTO code of good practice*. WTO.
- Penerapan SNI di berbagai produk sumbang 3,61% PDB. kabarbisnis.com. 12 November 2010. Diunduh 5 Februari 2011.
- Abdulwahab, S. 1999. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amstrong, M. 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Handoko, H. 1994. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Islamy, M.I. 1998. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan.
- Islamy, M.I. 1999. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musaneff. 1984. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, H.H. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Ratminto, & Atik, S.W. 2007. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, S.P. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sjamuddin, S. 2007. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
- Stocker, G. 1966. *Kepemerintahan sebagai Teori: Lima proposisi*. Materi Kuliah PPSUB, Malang.
- Stoner, James, A.F., dan R. Edward, F. 1992. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.
- Terry, G.R. 1991. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Widodo, J. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.
- Kumpulan Tulisan Mahasiswa Pascasarjana FIA Universitas Brawijaya. 2001. Tidak diterbitkan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Jasa.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 15/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 571/KEPI/BSN/161/2009 tentang Penetapan 3 (Tiga) Standar Nasional Indonesia.
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 03/KEP/BSN/1/2010 tentang Penetapan 2 (Dua) Amandemen Standar Nasional Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 04/KEP/BSN/1/2010 tentang Penetapan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia.

*Distribusi Jumlah Perusahaan Pengguna SNI Menurut Propinsi.* Badan Standarisasi Nasional Tahun 2008.

*Distribusi Perusahaan yang Tidak Menggunakan SNI dan SI.* Badan Standarisasi Nasional Tahun 2008.

*Hasil Survey Penilaian Kesesuaian Produk Berstandar SNI di Jawa Timur 2007-2010.* Badan Standarisasi Nasional 2010.

*WTO code of good practice.* WTO.

*Penerapan SNI di berbagai produk sumbang 3,61% PDB.* kabarbisnis.com. 12 November 2010. Diunduh 5 Februari 2011.